

The Role of Tourism and Culture Department of Sikka District and Village Government in The Development of The Tourism Sector of Kolisia B Village

¹Maria Frebiyati*, ²Danar Aswim
*Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere
Jl. Jendral Sudirman, Waioti, Maumere Nusa Tenggara Timur*
¹mariafrebiyati99@gmail.com*
²danaraswim@gmail.com

(Received: 29 Juli 2022 / Accepted: 23 Nov 2022/Published Online: 5 Desember 2022)

Abstract

This study aims to determine the extent of the Role of the Tourism and Culture Office of Sikka Regency and the Village Government in the Development of the Tourism Sektor in Kolisia B Village and what are the inhibiting factors in the development of the tourism sektor. This study uses a descriptive qualitative approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The informants involved in this study were the Department of Tourism and Culture in the section on developing tourist attractions and the Village Government of Kolisia B. The data collection techniques used were observation, interview and documentation techniques. Data analysis techniques include data reduction (data reduction), data display (data presentation) and conclusion drawing/verification. Based on the results of the study, the role of the Sikka Regency Tourism and Culture Office and the Village Government have carried out their role by providing training activities to the community, providing facilities in the form of rest areas for visitors, seats and public toilets, and establishing partnerships with private parties such as the NTT BANK, then The Department of Tourism and Culture and the Village Government have carried out their roles quite effectively to meet the needs and problems in the development of the tourism sektor, there are also various inhibiting factors in the development of the tourism sektor in the form of budgets, human resources, land ownership status and promotional media. The Sikka Regency Tourism and Culture Office and the Village Government need to socialize the community in stages to increase community participation in the development of the tourism sektor. There needs to be innovation and creativity in promoting tourism in print or internet media, so that tourism objects can be recognized, and there needs to be new breakthroughs made by the Tourism and Culture Office and the Village Government so that visitors are interested in visiting tourist attractions.

Keywords: *Role, Tourism and Culcute Department, Village Government, Development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Serta Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Desa Kolisia B dan apa saja faktor penghambat dalam pengembangan sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bagian pengembangan daya tarik wisata dan Pemerintah Desa Kolisia B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verificaton*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka serta Pemerintah Desa telah menjalankan perannya dengan memberikan kegiatan pelatihan kepada masyarakat, mengadakan fasilitas berupa tempat istirahat bagi para pengunjung, tempat duduk dan toilet umum, serta menjalin kerjasama dengan pihak swasta seperti BANK NTT,

maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa telah menjalankan perannya dengan cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan dan permasalahan pada pengembangan sektor pariwisata, adapula berbagai faktor-faktor penghambat pada pengembangan sektor pariwisata berupa anggaran, sumber daya manusia, status kepemilikan lahan dan media promosi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka serta Pemerintah Desa perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat secara bertahap untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata. Perlu adanya inovasi serta kreatifitas dalam mempromosikan wisata pada media cetak ataupun internet, agar obyek wisata dapat dikenal, dan perlu adanya terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa agar pengunjung tertarik mengunjungi tempat wisata

Kata Kunci: Peran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemerintah Desa, Pengembangan

I. PENDAHULUAN

Pariwisata sebagai penggerak sektor ekonomi dapat menjadi solusi bagi Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Sektor pariwisata tidak hanya menyentuh kelompok-kelompok ekonomi tertentu tetapi dapat menjangkau kalangan bawah. Kelompok masyarakat disekitaran obyek wisata dapat mendirikan berbagai kegiatan ekonomi misalnya tempat penginapan, layanan jasa transportasi, warung dan lain sebagainya [1]. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan potensi wisata. Adapun peran tersebut diantaranya adalah sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator [2]. Menurut Soekanto peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu [3]. Menurut Pitana dan Gayatri mengemukakan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai :

- a) Motivator : dalam upaya pengembangan sektor pariwisata peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai motivator yaitu diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan dan diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata berjalan dengan baik.
- b) Fasilitator : sebagai fasilitator dalam upaya pengembangan sektor pariwisata peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah menyediakan fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan.
- c) Dinamisator : sebagai dinamisator dalam upaya pengembangan sektor pariwisata peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah dapat menstimulasikan segenap pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengembangan sektor wisata ini [4].

Peran Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya ada tiga indikator yakni:

- a) Motivator : dalam pengembangan pariwisata diperlukan agar usaha terus berjalan, pemerintah daerah merupakan lembaga yang mempunyai legitimasi atau kedudukan yang dimana pada posisi statusnya mempunyai kekuasaan sehingga sangat berperan besar dalam memberikan motivator kepada pihak-pihak sektoral.
- b) Fasilitator : peran sebagai fasilitator yaitu sebagai penyedia segala fasilitas yang mendukung pengelolaan peningkatan potensi pariwisata yang ada diwilayah otonominya.
- c) Dinamisator : peran yang dimaksud disini adalah menggerakkan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pihak swasta dan masyarakat sendiri harus dilakukan secara terencana [4].

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinda Zizwatin Ainia dkk (2021) [5] dengan menggunakan teori yang sama dan metode yang sama yaitu metode deskriptif kualitatif dengan tiga indikator yang sama yaitu motivator, fasilitator dan dinamisator, teori yang di gunakan sama-sama menggunakan teori dari Pitana dan Gayatri, namun dengan lokasi dan hasil penelitian yang berbeda, penelitian yang saya lakukan dengan titik fokusnya peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa dalam pengembangan sektor pariwisata di desa kolisia B kecamatan magepanda

sedangkan titik fokus yang penelitian yang dilakukan oleh Dinda Zizwatin Ainia dkk(2021) adalah Peran Pemerintah Desa sekapuk dalam pengembangan obyek wisata bukit setigi kecamatan sekapuk [5].

Penelitian ini bermanfaat di bidang keilmuan dalam pemerintahan berbasis pengawasan pengembangan sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata juga dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, dan mengurangi angka pengangguran. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa sebagai unit utama dalam pengembangan sektor pariwisata dengan memberikan kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang secara teratur yang dapat menunjang keberhasilan pada pengembangn sektor pariwisata.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dinas Pariwisata mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan [6]. Menurut Sugiana pariwisata adalah rangkaian aktivitas, dan penyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan lain yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang, perjalanan yang dilakukan hanya untuk sementara waktu saja meninggalkan tempat tinggalnya dengan maksud beristirahat, berbisnis, atau maksud lainnya [7]. Menurut Munasef dalam Hadiwijoyo (2012:57) mengemukakan bahwa peran Dinas Pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan [8]. Sehingga dengan peran tersebut Dinas Pariwisata dapat mengembangkan sektor pariwisata di daerah tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal I Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [9]. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pengembangan sektor pariwisata sangat di perlukan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa.

Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda memiliki tempat wisata yang menarik dengan panorama hamparan sawah dan bukit-bukit yang indah salah satu obyek wisata yang di kenal dengan nama Pantai Nusa Kutu atau lebih dikenal dengan Bukit Nusa Kutu. Ketika sore hari pengunjungpun dapat menikmati panorama sunset dan dapat dijadikan spot foto sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan pengelihatn rata-rata tempat wisata ini memiliki peningkatan jumlah pengunjung setiap minggunya. Berbagai upaya telah dilakukan agar manfaat tempat wisata tesebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, namun hal tersebut belum tercapai karena pengelolaannya masih secara sederhana bahkan dilakukan secara perorangan seperti pengenaan tarif masuk, parkir kendaraan dan penggunaan fasilitas lainnya, adapun sarana dan prasarana yang belum mendukung obyek wisata tersebut seperti transportasi menuju tempat wisata yang belum lancar, kurang sadarnya pengunjung dalam menjaga kebersihan tempat wisata.

Penelitian ini lebih mengarahkan bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa dalam pengembangan sektor pariwisata di desa kolisia B kecamatan magepanda. Sejauh ini peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa cukup efektif dalam menjalankan perannya masing-masing. Pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa telah menjalin hubungan kerjasama dengan pihak swasta.

Dengan demikian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka perlu melakukan kegiatan pelatihan di Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda tentang pengelolaan pariwisata yang baik sehingga dapat menarik para wisatawan untuk datang berkunjung.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah [10]. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka dan di Desa Kolisia B Kecamatan Magepanda. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan [11], yaitu seperti Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, Pemerintah Desa Kolisia B. Sedangkan untuk data sekunder adalah menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain, dokumen dan arsip [11]. Pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang secara langsung ditempat penelitian [11] dengan titik fokus Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Serta Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Desa Kolisia B. Menurut Zuchri Abdussamad teknik analisis data terdiri dari *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* [12].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa dalam pengembangan sektor pariwisata Desa Kolisia B Kabupaten Sikka

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dinas Pariwisata mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kepariwisataan [6]. Dari hasil penelitian di lapangan dapat diuraikan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa telah menjalankan tugas dan fungsinya cukup efektif, dengan memberikan kegiatan pelatihan seperti tata kelola destinasi wisata dan rencana pengembangan wisata kepada pelaku usaha. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa sama-sama terus melakukan pembenahan dalam pengembangan sektor pariwisata yang ada di Desa Kolisia B, untuk fasilitas yang ada dilokasi selain pantai terdapat juga tempat duduk, tempat istirahat bagi para pengunjung dan toilet umum.

a. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka mempunyai peran penting dalam pengembangan sektor pariwisata diantaranya sebagai berikut:

1. Motivator

Peran Pemerintah Daerah sebagai motivator sebagaimana dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri (2005) dalam pengembangan sektor pariwisata peran Pemerintah Daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha di bidang pariwisata terus berjalan [7]. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai motivator dalam pengembangan sektor pariwisata dapat dilihat bagaimana memotivasi dan memberikan semangat kepada masyarakat agar tujuan dalam pengembangan sektor pariwisata dapat tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala bidang pengembangan daya tarik wisata yaitu dukungan atau motivasi yang diberikan dengan melakukan kegiatan pelatihan kepada masyarakat, hal ini merupakan salah satu motivasi dan penyemangat agar masyarakat dapat mengelola, mengembangkan dan menerapkan pengembangan sektor pariwisata sesuai dengan apa yang sudah didapatkan agar dapat meningkatkan pendapatan ekonomi pada sektor pariwisata. Maka dengan demikian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai kewajiban yang harus dilakukan yaitu dengan terus memberikan motivasi dan penyemangat kepada masyarakat untuk pengembangan sektor pariwisata di waktu yang akan datang serta masukkan-masukkan yang positif dan dukungan yang lebih baik lagi kepada masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata.



Sumber : Arsip dokumentasi foto Pemerintah Desa Kolisia B

Gambar. 1

(Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata
oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)

2. Fasilitator

Sebagaimana yang di sampaikan oleh salah satu kepala bagian pengembangan daya tarik wisata untuk pengembangan sektor pariwisata penyediaan sarana dan parasana, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dalam hal penyediaan sarana dan prasarana menyerahkan sepenuhnya kepada pelaku usaha obyek wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka hanya memberikan atau membantu sejumlah dana atau anggaran dalam pengembangan obyek wisata jika ada yang mengajukan dana untuk dikembangkan melalui surat. Namun dalam pemberian dana tersebut harus memenuhi kriteria yang ada seperti memiliki potensi jual, dan dikembangkan didukung oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa dan kelembagaan yang ada di desa, sarana dan prasarana sudah memenuhi sehingga dapat ditindak lanjuti serta dapat di danai, karena pada dasarnya pariwisata di Desa Kolisia B berbasis masyarakat sehingga di kelola dan di kembangkan sendiri oleh masyarakat dalam membangun sarana dan prasarananya.

3. Dinamisator

Dalam pilar *Good Governance* (pemerintahan yang baik) agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik [7]. Sebagai upaya dinamisator pengembang pariwisata di Kabupaten Sikka selama ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerja sama antara sektor, baik sektor swasta, sektor pemerintahan lainnya, maupun masyarakat. Kerjasama dengan pihak swasta merupakan hal yang penting dilakukan untuk pengembangan obyek wisata karena sebagai penunjang dalam kegiatan berpariwisata, dengan begini dapat menguntungkan untuk pendapatan daerah dalam pengembangan sektor pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dalam kaitannya dengan masyarakat yaitu dengan menyediakan usaha sendiri seperti *home stay* atau menjual barang-barang lokal/kerajinan tangan dan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disini adalah memberikan informasi terkait dengan *home stay* atau kerajinan tangan yang ada di lokasi wisata, sehingga wisatawan tidak khawatir dengan jarak yang ditempuh untuk menginap dan berwisata dengan hal tersebut juga meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Peran Pemerintah Desa Kolisia B Kabupaten Sikka

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Pitana dan Gayatri, Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Desa Kolisia B sebagai Motivator

Dalam menjalankan perannya sebagai motivator, pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar roda usaha pariwisata terus berjalan. Dalam hal ini Pemerintah Desa harus lebih banyak memotivasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata [7]. Pemerintah Desa sebagai motivator dalam upaya pengembangan sektor pariwisata di Desa Kolisia B yaitu dengan cara Pemerintah Desa terus memotivasi dan mendorong semangat para pelaku usaha untuk terus berusaha melakukan perubahan lokasi wisata supaya dapat menarik para pengunjung untuk datang berkunjung. Pemerintah Desa memberikan motivasi atau dukungan dengan cara memberikan kegiatan pelatihan kepada masyarakat Desa Kolisia B dan masyarakat mampu menerapkan kegiatan pelatihan yang sudah didapatkan dalam pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini menjadi ujung tombak untuk pengembangan sektor pariwisata dan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat, serta dapat mengurangi angka pengangguran masyarakat Desa Kolisia B.



Sumber : Kamera pengambilan gambar tahun 2022

Gambar. 2

(Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata oleh Pemerintah Desa Kolisia B)

2. Peran Pemerintah Desa Kolisia B sebagai Fasilitator

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Pemerintah Desa sebagai fasilitator adalah memfasilitasi penyediaan aspek-aspek yang berhubungan dengan pengembangan sektor pariwisata. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah memfasilitasi pengembangan obyek wisata seperti membuka jalan menuju tempat wisata, menyediakan penunjuk arah menuju tempat wisata dan menyiapkan dana atau anggaran untuk pengembangan sektor pariwisata, hal ini menjadi tolak ukur untuk pengembangan sektor pariwisata yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Peran Pemerintah Desa Kolisia B Sebagai Dinamisator

Dalam menjalankan perannya sebagai Dinamisator, pemerintah daerah membutuhkan pilar *Good Governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, masyarakat dan investor harus bersinergi dengan baik [7]. Pemerintah Desa juga mengajak BANK NTT bekerja sama guna untuk mendapatkan dana dalam pengembangan sektor pariwisata. Pemerintah Desa juga sebagai salah satu pihak dalam pembangunan obyek wisata yang memiliki peran untuk mensinergikan semua pihak untuk berpartisipasi dalam pengembangan sektor wisata tersebut, agar terciptanya suatu symbiosis mutualisme demi pengembangan sektor wisata. Dalam upaya Pemerintah Desa untuk mensinergikan antara pihak, pelan-pelan Pemerintah Desa sudah mulai berinovasi dalam pengelolaan sektor wisata. Upaya Pemerintah Desa dalam pengembangan sektor pariwisata dalam mensinergikan antara pihak pengembangan sektor pariwisata ini memang tidak mudah, tetapi dalam hal ini peran Pemerintah Desa sudah menjalankan perannya yaitu sebagai dinamisator.



Sumber : Arsip dokumentasi foto Pemerintah Desa Kolisia B

Gambar.3
(Pertemuan Kerja Sama Antara BANK NTT dan Pemerintah Desa)

2. Faktor-faktor yang menghambat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa Kolisia B dalam pengembangan sektor pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Kolisia B adapun faktor penghambatnya untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa yaitu anggaran, sumber daya manusia (SDM), status kepemilikan lahan, dan kurangnya media promosi. Sampai saat ini beberapa faktor ini masih menjadi penghambat dalam proses pengembangan sektor pariwisata.

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Dalam pengembangan sektor pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengalami faktor-faktor penghambat seperti yang disampaikan oleh bapak Adrianus Ledang S.Sos sebagai Kepala Bagian Pengembangan Daya Tarik Wisata diantaranya yaitu :

1. Anggaran

Salah satu yang menjadi kendala mengapa pengembangan sektor pariwisata belum berjalan maksimal adalah dana dimana anggaran dana termasuk dalam dana DAK (Dana Alokasi Khusus) yaitu dana yang didapatkan dari pusat. Dalam hal anggaran atau pendanaan juga berpengaruh terhadap status kepemilikan lahan. Anggaran juga merupakan salah satu faktor penghambat dimana untuk membangun sektor pariwisata membutuhkan dana. Dengan adanya dana sehingga mampu untuk bersaing dengan daerah lain dan dapat membangun sarana dan prasarana yang memadai, menyiapkan beberapa fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan para wisatawan sehingga para wisatawan juga merasa nyaman selama berada di tempat wisata.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa. Namun pada implementasinya beberapa dari mereka tidak mengikuti kegiatan karena mindsetnya mereka yang belum memiliki kesadaran tentang pariwisata, masih banyak pengelola atau pelaku pariwisata belum mempunyai pengetahuan untuk mengelola dan mengembangkan obyek wisata termasuk dalam melayani pengunjung.

3. Status Kepemilikan Lahan

Dalam pengembangan sektor pariwisata, status kepemilikan lahan juga menjadi salah satu faktor penghambat dimana, tempat wisata yang berada di Desa Kolisia B masih di klaim milik

perorang. Untuk membangun sebuah lokasi wisata lahan yang digunakan harus lahan dari Pemerintah Daerah atau bisa juga lahan hibah dari masyarakat sekitar lokasi wisata.

b. Pemerintah Desa Kolisia B Kecamatan Magepanda

Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya untuk pengembangan sektor pariwisata terdapat kendala dan hambatan yang disampaikan oleh bapak Bonifasius Jolhi sebagai sekretaris Desa Kolisia B diantaranya yaitu :

1. Kurangnya Media Promosi

Pemerintah Desa dalam pengembangan sektor pariwisata masih memiliki kekurangan yaitu media promosi dalam pengembangan obyek wisata ataupun destinasi wisata dalam pemasarannya adalah hal yang paling penting dilakukan. Media promosi menjadi salah satu hal yang sangat baik jika Pemerintah Desa sudah memiliki website sendiri tetapi hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Pemerintah Desa yaitu dalam pengembangan sektor pariwisata salah satu kendala yang dialami oleh Pemerintah Desa adalah masih kurangnya media promosi, saat ini Pemerintah Desa sendiri belum ada website untuk mempromosikan lokasi wisatanya. Untuk mempromosikan lokasi wisata ini hanya melalui *facebook* dan *whatsapp*. Padahal dengan adanya media promosi ini bisa meningkatkan jumlah pengunjung untuk berkunjung ke lokasi wisata.

2. Anggaran

Pemerintah Desa untuk pengembangan sektor pariwisata sendiri anggaran atau dana belum diadakan, akan diadakan kurang lebih pada tahun 2022, Pemerintah Desa juga akan bekerja sama dengan BANK NTT ini akan menjadi pegangan kuat untuk Pemerintah Desa. Anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan sektor pariwisata, dengan adanya anggaran semua yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa dapat terealisasi dengan baik serta dapat membuat perubahan pada lokasi wisata sehingga dapat menarik para pengunjung. Hal ini berbanding terbalik dengan anggaran yang ada di Pemerintah Desa karena sampai saat ini Pemerintah Desa belum menetapkan anggaran untuk pengelolaan sektor pariwisata.

3. Status Kepemilikan Lahan

Bagi Pemerintah Desa Kolisia B, faktor penghambat selama ini juga terjadi karena adanya status kepemilikan lahan dimana untuk lokasi tempat wisata ini masih didasari milik perorangan dan untuk pendapatan sendiri masih milik tuan lahan belum diberikan kedesa sebagai salah satu pemasukan untuk desa. Pemicu faktor penghambat juga ada pada status kepemilikan lahan dimana lokasi wisata yang ada di Desa Kolisia B masih di klaim milik perorangan. Masalah status kepemilikan lahan juga masih ada konflik antara pemilik lahan dimana mengenai batas tanah dimana dilokasi wisata sudah ada pilar yang menjadi patokan atau menjadi batas antara pemilik lahan tetapi masih ada juga yang mengklaim bahwa pilar tersebut tidak sesuai dengan batasannya, sehingga demikian menjadi permasalahan antara sesama pemilik lahan dan juga mengenai pendapatan atau pemasukan, salah satu dari pemilik tanah memiliki pendapatan yang lebih dari para pengunjung yang datang berkunjung maka dari situlah terjadi percecokan antara pemilik lahan mereka selalu bertanya kenapa pemasukan mereka setiap minggu dari pengunjung hanya begini-begini saja, sedangkan disebelah pemasukannya setiap minggu selalu meningkat. Ini juga menjadi satu catatan untuk pemilik lahan untuk melakukan pembenahan dilokasi wisata. Untuk membangun sebuah lokasi wisata status kepemilikan lahan harus milik Pemerintah Desa sehingga Pemerintah Desa dapat bergerak bebas dalam membangun atau mengelola sektor pariwisata, serta terus melakukan pembenahan sehingga dapat menarik para pengunjung, ini juga untuk pemasukan bagi desa, sehingga semuanya akan kembali untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa sudah cukup maksimal dalam menjalankan perannya masing-masing. Dalam pengembangan sektor pariwisata juga masih terdapat factor penghambat baik Dinas Pariwisata maupun Pemerintah Desa, namun demikian Dinas Pariwisata maupun Pemerintah Desa terus melakukan pembenahan-

pembenahan dalam pengembangan sektor pariwisata, sehingga dengan demikian sektor pariwisata yang ada di desa kolisia B mengalami kemajuan dan dapat menarik para wisatawan untuk datang berkunjung. Dinas Pariwisata maupun Pemerintah Desa telah menjalin kerja sama dengan pihak swasta seperti Bank NTT dan Lembaga Asosiasi Desa Wisata. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinda Zizwatin Ainia dkk (2021) belum adanya kerja sama antara pihak Dinas Pariwisata dan Pemerintah Desa, maupun pihak swasta.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka serta Pemerintah Desa Kolisia B sudah menjalankan tugasnya dengan cukup efektif dan dirasa cukup maksimal antara lain memberikan motivasi bagi para pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengembangan sektor pariwisata, memberikan pelatihan seperti tata kelola destinasi wisata dan rencana pengembangan wisata bagi pelaku usaha. Pemerintah Desa Kolisia B, untuk memberikan perhatian terhadap pengembangan obyek wisata yang berada di Desa Kolisia B seperti menjalin kerja sama dengan pihak swasta, seperti BANK NTT. Kendala atau hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka serta Pemerintah Desa Kolisia B dalam pengembangan sektor pariwisata Desa Kolisia B diantaranya adalah anggaran yang masih sangat terbatas, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha dengan kemampuan dan ketrampilan yang terbatas sangat mempengaruhi kemajuan obyek wisata, kurangnya media promosi dan status kepemilikan lahan pada obyek wisata dimana lokasi tempat wisata ini masih menjadi milik perorangan sehingga pengelolaan termasuk pungutan masih dipungut secara perorangan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka serta Pemerintah Desa perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat secara bertahap untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata. Pemerintah Desa Kolisia B perlu membentuk Peraturan Desa tentang pengelolaan pariwisata serta mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai wadah pengelola usaha. Perlu adanya inovasi serta kreatifitas dalam mempromosikan wisata pada media cetak ataupun internet, agar obyek wisata dapat dikenal, dan perlu adanya terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Desa agar pengunjung tertarik mengunjungi tempat wisata Nusa Kutu desa Kolisia B.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Masitah Itah. (2019). Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Jurnal. Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. 6: 2614-2945
- [2] Pitana, I Gede dan Gayatri, Putu G. (2005). Sosiologi Pariwisata. Andi. Yogyakarta.
- [3] Soekanto, Soerjono. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Rajawali, Jakarta.
- [4] Pitana, I Gede dan Gayatri, Putu G. (2005). Sosiologi Pariwisata. Andi. Yogyakarta.
- [5] Dinda Zizwatin Ainia(dkk). (2021). Peran Pemerintah Desa Sekapuk Dalam Pengembangan Obyek Wisata Bukit Setigi Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Jurnal. Respon Publik. 15:57-61
- [6] Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- [7] Sugiana. A. G. (2011). Ecotourism: Pengembangan Pariwisata Berbasis Konservasi Alam. Bandung: Guardaya Intimarta.
- [8] Hadiwijoyo. (2012). Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata. Jakarta:Pardya Paramita.
- [9] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- [10] A.B Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, CV.

[11] Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (mix methods). Bandung : Alfabeta

[12] Zuchri Abdussamad.(2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar : CV Syakir Media Press.